

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN DALAM PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



REZA ADHA
NPM : 167310582

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Reza Adha
Npm : 167310582
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas UKM Perdagangan dan Perindustrian Di Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan masing masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk dilakukan ujian komprehensif

Pekanbaru 22-11- 2021
Pembimbing

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Stanjean Arie Febrian, S.IP.,M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Reza Adha
Npm : 167310582
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pelalawan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di
Kecamatan Pangkalan Kuras

Naskah skripsi ini secara keseluruhan, dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru 8 Maret 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris.

Ketua

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.sos, M.si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reza Adha
Npm : 167310582
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pelalawan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di
Kecamatan Pangkalan Kuras

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru 23 Februari 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris.

Ketua

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos, M.si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 003/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- imbangan** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- ingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Reza Adha
N P M	: 167310582
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten pelalawan Dalam Pengelolaan pasar Tradisional di kecamatan Pangkalan Kerinci.

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Data Wardana, S.Sos., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Syaprianto, S.Sos., M.IP. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rendi Tri Afrinanda, s.Ip., M.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi
A r s i p -----sk.penguji-----

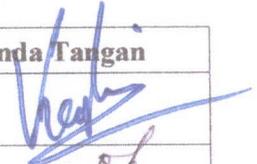
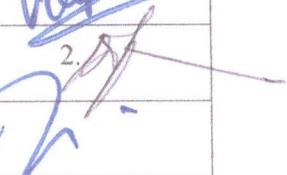
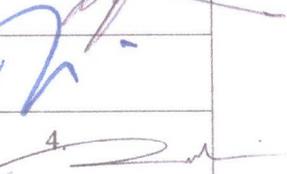
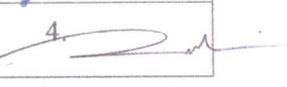
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 003 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 05 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 06 Januari 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Reza Adha
NPM : 167310582
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Pangkalan Kerinci**

Nilai Ujian : Angka : " 79 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Notulen	4. 



India Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Di Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibuk Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak

memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Skripsi ini.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras, doa restu, waktu serta kesabaran yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan ataupun dari materi, maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Reza Adha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumsan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II.....	19
KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Ilmu Pemerintahan.....	19
2. Konsep Manajemen.....	22
3. Konsep Pengembang Organisasi.....	24
4. Konsep Manajemen Pengelolaan.....	24
5. Konsep Perencanaan Strategi.....	26
6. Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional.....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Berpikir.....	29
E. Oprasional Variabel.....	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian.....	33

B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan dan Key Informan	34
1. Informan	34
2. Key Informan.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Jadwal Penelitian	38
BAB IV	40
LOKASI PENELITIAN.....	40
A. Letak Geografis Kabupaten Pelalawan.....	40
B. Sejarah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.....	42
C. Struktur Organisasi	43
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	44
BAB V.....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Identitas informan dan key informan.....	52
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
1. Perencanaan	54
2. Organizing	59
3. Actuating.....	65
4. Controlling.....	71
C. Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Manajemen Pasar	75
1. Perencanaan	75
2. Organizing	77
3. Actuating.....	77
4. Controlling.....	78
BAB VI	79
KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
A. Buku.....	82

B. Jurnal86
C. Dokumentasi86



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Hlm
I.1	Data- data pasar Tradisional di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	14
II.1	Penelitian Terdahulu.....	28
II.2	Operasional Variabel.....	31
III.1	Keadaan Informan dan Key Informan.....	35
III.2	Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang manajemen pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupatenpelalawan.....	39
V.1	Informan.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hlm
II.1	Grafik Anak Berhadapan Hukum.....	29



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Adha
NPM : 167310582
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul UP : Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Di Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyarat administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manpun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2021
Pelaku Pernyataan,



Reza
za Adha

**MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS
KOPERASAI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI
KELURAHAN SOREK SATU PANGKALAN KURAS KABUPATEN
PELALAWAN**

**ABSTRAK
REZA ADHA**

Penelitiann ini berjudul “Manajemen Peneglolaan Pasar Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Penelitian ini dilakukan demi mengetahui (1) Manajemen strategi pengelolaan pasar oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di pasar sorek satu, (2) faktor penghambat dalam manajemen strategipengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan fenomena yang ditemukan dilapang mengenai kondisi pasar yang dirasa perlu perhatian lebih, dikarenakan banyak hal-hal yang belum maksimal pengelolaannya, mulai dari ketertiban pelanggan, kebutuhan perbaikan bangunan, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh petus yang berada di lokasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dinas terkait memiliki dua tujuan utama sebagai garis besarnya, yaitu meningkatkan kualitas pasar dari segi infrastruktur, baik itu bangunan, kios, lahan parkir, drainase yang lancar, aspek-aspek pendukung lain dalam menunjang kegiatan perdagangan yang terjadi dipasar tradisional tersebut. Tujuan kedua yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan ialah meningkatkan kualitas produk dan kualitas pedaganng, agar terciptanya daya saing yang tinggi serta memancing konsumen untuk datang membeli, dikarenakan produk yang dimiliki tidak kalah dengan produk pada wilayah lain. (2) factor penghambat yang ditemukan ialah pelaksanaan tugas masing masing pemegang wewenang pengelolaan pasar yang masih belum maksimal, peran masyarakat dalam kerjasama untuk peningkatan kualitas pasar yang kurang, serta pengawasan pihak terkait yang belum maksimal.

Kata Kunci: Manajemen, Pasar Tradisional

**MANAGEMENT OF TRADITIONAL MARKET MANAGEMENT BY
DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY SMEs IN SOREK ONE
KELURAS, PANGKALAN KURAS, PELALAWAN REGENCY**

**ABSTRACT
REZA ADHA**

This research is entitled "Market Management Management by the Industry and Trade UKM Cooperative Service in Sorek Satu Village, Pangkalan Kuras, Pelalawan Regency. This research was conducted to find out (1) Market management strategy management by the Industry and Trade UKM Cooperative Department in Sorek Satu market, (2) inhibiting factors in the management of traditional market management strategies by the Department of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade. The method used in this research is descriptive research. Data collection was done by interview, observation, and documentation. Based on the phenomena found in the field regarding market conditions that are felt to need more attention, because there are many things that have not been optimally managed, ranging from customer order, the need to repair buildings, to abuse of authority by officers who are on site. Data analysis in this study uses three components consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that (1) the relevant agencies have two main objectives as an outline, namely improving the quality of the market in terms of infrastructure, be it buildings, kiosks, parking lots, smooth drainage, other supporting aspects in supporting trade activities that occur in the traditional market. The second goal of the Department of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade, Pelalawan Regency is to improve product quality and the quality of traders, in order to create high competitiveness and encourage consumers to come to buy, because the products they have are not inferior to products in other regions. (2) the inhibiting factors found are the implementation of the duties of each holder of market management authority which is still not maximized, the role of the community in cooperation to improve market quality is lacking, and the supervision of related parties has not been maximized.

Keywords: Management, Traditional Market

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas berlangsungnya hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang melakukan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia akan membuat pemerataan daerah, sehingga perekonomian, infrastruktur, dan juga pendidikan yang seimbang di seluruh daerah akan membuat kesenjangan sosial setiap daerah berkurang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang

sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren di bagi lagi menjadi dua bagian yaitu urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib meliputi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan wajib pelayanan non dasar. Dan kemudian urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Dengan adanya undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dengan di berikan nya keleluasaan untuk menjalankan dan di berikan hak- hak istimewa, di antaranya adalah terkait dengan manajemen strategi pengelolaan pasar yaitu memuat tentang pembangunan, pengawasan serta pembinaan pasar tradisional.

Menurut Abdullah Rozali, 2007 penerapan otonomi daerah memerlukan dukungan serta pengembangan suatu sistem manajemen strategi pengelolaan dan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan serta masyarakat secara luas. Dalam pemerintahan perlu ditimbulkan perilaku saling membangun dan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan dalam pembangunan pasar tradisioal, dan sudah selayaknya rasa tanggung jawab dalam pembangunan dari daerah terutama pasar dikarnakan pasar merupakan salah satu cara dalam pengembangan dari daerah. Pengembangan di daerah perdesaan saat ini yang menjadi prioritas ialah manajemen strategi

pengelolaan pasar tradisional, sebagai upaya dari pemerintah itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pengembangan pasar tradisional di daerah perdesaan memiliki perbedaan dalam halnya pengembangan di daerah. Upaya nyata perlu dengan cepat dan tepat dilakukan sehingga membuat akselerasi kemajuan terhadap kemajuan terhadap perekonomian daerah tersebut ialah pelopor sistem otonom dan juga berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Daerah sebagai kawasan yang diberikan hak istimewa, seperti pengelolaan pasar.

Menurut Abdul Aziz Hakim 2011, bahwa di era reformasi dan juga desentralisasi saat ini merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal penataan dan pembinaan pasar tradisional termasuk dalam urusan konkuren di mana urusan yang di bagi langsung antara urusan pusat dan daerah tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Indonesia No 112 tahun 2014 tentang penataan dan

pembinaan pasar tradisional, pasar merupakan Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
2. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
3. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau

beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;

4. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
6. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
7. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip

saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

10. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan
11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah setempat;
12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Dalam manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan manajerial dan aksi pengambilan keputusan jangka Panjang di dalam perusahaan. dalam manajemen strategi sendiri memiliki beberapa tahapan manajemen strategi yang saling memiliki interaksi dan timbal balik dari tahap pertama hingga akhir. Dengan pendekatan manajemen strategi, manajemen pada semua tingkatan pengelolaan pasar berinteraksi dalam perencanaan dan pengimplementasian. Sebagai akibatnya, konsekuensi

prilaku manajemen strategi serupa dengan pengembalian keputusan partisipasif. Oleh karna itu, penilaian yang akurat mengenai dampak dari formulasi strategi terhadap kinerja organisasi tidak hanya memerlukan kriteria evaluasi keuangan, tetapi juga non keuangan pengukuran dampak berbasis perilaku (Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan 2006).

1. Perencanaan
2. Organizing
3. Actuating
4. Controlling

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern

dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan . Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah setempat. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Dalam penetaan pasar tradisional sendiri menurut peraturan presiden no 112 tahun 2007 ialah Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Penyediaan areal parkir sebagaimana dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain. Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional. Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
- e. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
- f. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud , atas permintaan Menteri maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah. Syarat-syarat didirikannya pasar tradisional menurut Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 mengenai pembangunan, penataan, dan pembinaan pasar tradisional, yaitu:

- 1) Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan,

kenyataan ini berwujud jalan dan transportasi atau peraturan lalu lintas.

- 2) Kompabilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungan.
- 3) Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.
- 4) Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan alam yang mewadahnya.

Secara lebih mendetail, komponen-komponen dalam pasar tradisional dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
- 2) Los adalah tempat berdagang yang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling.
- 3) Oprokan/pelataran adalah tipe tempat berjualan yang terbuka atau tidak dibatasi secara tetap, tetapi mempunyai tempatnya sendiri. Pedagang oprokan di pasar adalah pedagang asongan yang berjualan di dalam pasar maupun yang di luar pasar tetapi masih menempel di dinding pasar.

Sedangkan menurut Permendagri No 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional bagian satu tentang perencanaan menjelaskan bahwasanya Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar

tradisional. Perencanaan pasar tradisional sebagaimana meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
 - (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

- (1) huruf b antara lain:
 - a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Peraturan Daerah No 10 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan;
- d. penyusunan pedoman teknis program dalam mendukung pengembangan usaha perdagangan;
- e. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usahatoko swalayan;
- f. penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (skpb);
- g. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw), untuk penerimaan waralaba dalam negeri dan luar negeri beserta lanjutannya;
- h. pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pe-label-an barang berbahaya;
- i. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan beserta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- j. pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah serta melakukan operasi pasar;
- j. pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- k. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal,

pameran dagang nasional, dan misi dagang bagi produk ekspor

unggulan beserta kampanye pencitraan produk ekspor;

- l. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- m. penyiapan pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- n. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan di bidang perdagangan;
- o. memberikan pembinaan, dukungan dan fasilitasi ekspor dan impor;
- p. pelaksanaan administrasi Bidang Perdagangan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel I.1: Data- data pasar Tradisional di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan Nama Pasar (Pangkalan Kuras)	Tahun Berdiri	Luas Lahan Pasar	Titik Koordinat	Waktu Pasar (Mingguan\Harian)	Jumlah Pedagang
1	Pasar Baru Sorek		20.000	102°03'37,89" E(0°07'37,19" N)	Harian	128
2	Pasar beringin Indah	2014	10.000	101°58'00,7" E(0°12'34,1" N)	Selasa	35
3	Pasar Harapan	2005	13.000	101°55'45,3" E(0°14'36,9" N)	Rabu	120

No	Kecamatan Nama Pasar (Pangkalan Kuras)	Tahun Berdiri	Luas Lahan Pasar	Titik Koordinat	Waktu Pasar (Minggu n\Haria n)	Juml ah Peda gang
	Jaya					
4	Pasar Silang Indah		10.000	101°57'09,2" E(0°14'02,5" N)	Jum' at Pag i	78
5	Pasar Sidomukti	1995	20.000	102°00'36,6" E(0°11'59,8" N)	Kamis	220
6	Pasar Lubuk Singeri	2015		101°58'57,3" E(0°15'36,3" N)	Sabtu sore	150
7	Pasar Tratang Manuk	2015		101°59'26,1" E(0°14'43,22" N)	Tidak Aktif	-
8	Pasar Sungai Medan			101°79'44,30" E (0°03'01,59" S)	Kamis	102

Sumber : Data-data Pasar Tradisional

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwasanya pasar sorek baru termasuk jajaran pasar yang memiliki luas tanah yang cukup besar dan pasar baru sorek satu juga pasar yang beroperasi tiap hari, pasar baru juga memiliki banyak pedagang. Jadi, dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwasanya terjadi masalah dalam pengelolaan serta manajemen pasar yang masih kurang efektif.

Namun pada kenyataannya kondisi pasar tradisional yang ada di kelurahan sorek satu dianggap tidak nyaman untuk pedagang dan para konsumen. Fisik

bangunan pasar kurang sudah rusak, kurangnya tempat sampah, saluran limbah yang telah tertutup, kurangnya pencahayaan dan banyaknya pedagang yang berjualan secara lesehan karena tidak mendapatkan tempat. Keberadaan pedagang tersebut mengganggu kelancaran akses distribusi dan lalu lintas pengunjung atau pembeli. Hal ini tentu mengurangi daya tarik pengunjung untuk berbelanja di pasar tradisional. Perparkiran di sekitar pasar juga telah mengakibatkan kemacetan kendaraan yang melintas maupun kendaraan milik pedagang dan pembeli yang menuju / meninggalkan pasar. Kondisi pasar di atas, khususnya pasar Sorek satu perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak khususnya stakeholder pasar dan pemerintah daerah sebagai pengelola. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memberdayakan pasar tersebut sebagai pasar tradisional yang kompetitif, namun hasilnya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada secara nyata. Berdasarkan penjelasan mengenai manajemen strategi pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang penulis temukan di pasar sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan sebagai berikut:

1. Terindikasi dalam Perencanaan yang yang tidak terlaksana mengakibatkan banyaknya bangunan pasar di sorek satu masih luput dari perhatian. Hal itu terlihat dari bangunan kios di pasar yang masih tidak layak guna tpi masih di manfaatkan oleh pedagang yang tidak memiliki kios atau tempat berjualan.
2. Terindikasi Implementasi di mana pembangunan pasar seperti,

pembangunan kios-kios atau pun tempat untuk berjualan yang tidak layak pakai. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang yang berjualan masih lesehan karna tidak adanya tempat yang tersedia di pasar sorek satu.

3. Terindikasi kurangnya Pengawasan dalam pemberdayaan pasar tradisional di pasar sorek satu kabupaten pelalawan. Hal itu terlihat dari kebersihan dan perawatan pasar sorek satu yang tidak efektif, seperti kebersihan pasaryang tidak diperhatikan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**.

B. Perumsan Masalah

Dari uraian di atas dan masalah yang digambarkan, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu: **”Bagaimana Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Di Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui manajemen strategi pengelolaan pasar oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di pasar sorek satu.
- b. Untuk mengetahui factor penghambat dalam manajemen strategi pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

2. Kegunaan Penelitian

- c. Sebagai pengembangan praktis dan teoritis ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
- d. Sebagai bahan masukan terutama pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam mengelola pasar tradisional yang bersuber pada kelurahan sorek satu.
- e. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terutama dengan masalah yang sama di masa yang akan datang

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan mauoun dalam menjawab dalam permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (publik policy). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan decision making (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah).

Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu

pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas). Dan menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori van vollenhoven, hanya meliputi “bestuur” saja). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. memiliki tujuan untuk mewujudkan negara.

Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau

penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan. Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah adalah Presiden Republik.

Sedangkan menurut Pasolong dalam Supriadi Legino menjelaskan bahwa birokrasi adalah organisasi yang dipimpin oleh pejabat pemerintah dibawah menteri yang memiliki tugas utama sebagai pemberi pelayanan. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan, seringkali oleh

masyarakat diartikan dalam konotasi yang berbeda.

2. Konsep Manajemen

Menurut Stoner (Handoko, 2011: 8), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan.

Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang ditetapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen menurut Parker (Stoner & Freeman) yang ditulis oleh Husaini Usman adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*). Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah, yang meliputi manajemen perencanaan program sekolah/madrasah. Manajemen yang mengatur jalannya suatu proses dalam mencapai suatu tujuan tentunya memiliki fungsi-fungsi yang bertujuan supaya sistematis urutan pembahasannya lebih teratur, lebih mudah dan lebih mendalam. Fungsi-fungsi manajemen antara lain :

- a. *Planning* yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat

mencapai tujuan-tujuan itu.

- b. Organizing yaitu pengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatankegiatan itu.
- c. Stafing Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan dan pengembangan tenaga kerja.
- d. Motivation Yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
- e. Controling Yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab, penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korelatif.

Dari beberapa fungsi fundamental itu masih banyak fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, tetapi yang terpenting dan perlu kita ketahui pengertian fungsi-fungsi dan aktifitas-aktifitas yang harus dilakukan pada setiap fungsi fundamental itu. Dalam praktiknya pembagian fungsi fundamental ini tidak dapat dibedakan secara tajam dan tegas, karena setiap manajer dalam usaha atau aktifitas-aktifitas untuk mencapai tujuan harus melaksanakan fungsi tersebut, hanya skop dan penekanannya yang berbeda-beda, setiap manajer dalam pelaksanaannya, aktivitasnya dan kepemimpinannya, untuk mencapai tujuan harus melaksanakan “perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian” dengan baik.

3. Konsep Pengembang Organisasi

Menurut Wendell dan Brench dalam Handoko (2009 : 337) pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses - proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif.

4. Konsep Manajemen Pengelolaan

Menurut Jaunch dan Glueck (Purwanto, 2006:75), manajemen pengelolaan adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola, pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri. Menurut Winardi manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan manusia serta sumber-sumber lain. Sedangkan untuk memahami strategi sering kali terasa tidak mudah, karena setiap literatur memberikan definisi yang berbeda dan sampai saat ini tidak ada definisi yang baku.

Untuk memperjelas definisi strategi, sebagian orang berusaha mencoba membedakan antara strategi dan taktik, yaitu strategi sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, sedangkan cara-cara untuk mencapai tujuan jangka

pendek disebut sebagai taktik. Menurut Husni Mubarak, kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos “ yang berasal dari “stratus” yang berarti militer dan “ ag “ yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan dan memenangkan perang. Sementara Nanang Fatah berpendapat bahwa strategi adalah langkah- langkah yang sistematis dan sistemis dalam melakukan rencana secara menyeluruh (makro) dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan. Hill dan Jones berpendapat bahwa, ada dua pendekatan untuk mendefinisikan strategi, yang dikenal sebagai pendekatan tradisional dan pendekatan baru.

Dalam pendekatan tradisional strategi difahami sebagai suatu rencana kedepan, bersifat antisipatif (forward looking), Sedangkan dalam pendekatan yang baru, strategi lebih difahami sebagai suatu pola dan bersifat reflektif (backward-looking) . J. R. David, menjelaskan bahwa dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designet to achives a particular educational goal, dengan kata lain strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.Strategi dapat diartikan pula sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut Newman dan Magon startegi dasar setiap usaha meliputi empat masalah masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan

aspirasi masyarakat yang memerlukannya.

- b. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran.
- c. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir.
- d. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan.

5. Konsep Perencanaan Strategi

Menurut Bryson (2004 : 30-51), perencanaan strategis adalah inovasi manajemen yang dapat bertahan lama, karena perencanaan strategis dibangun di atas pembuat keputusan politik. Proses perencanaan strategik dibagi menjadi sepuluh langkah, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan sampai langkah ketujuh, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan awal.
- 2) Memperjelas mandat organisasi.
- 3) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
- 4) Menilai lingkungan eksternal.
- 5) Menilai lingkungan internal.
- 6) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
- 7) Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.

6 . Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengelolaan merupakan terjemahan dari Management. Manajemen berasal dari

kata to manage yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Stoner dalam Handoko 1 menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur- sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.

B. Penelitian Terdahulu

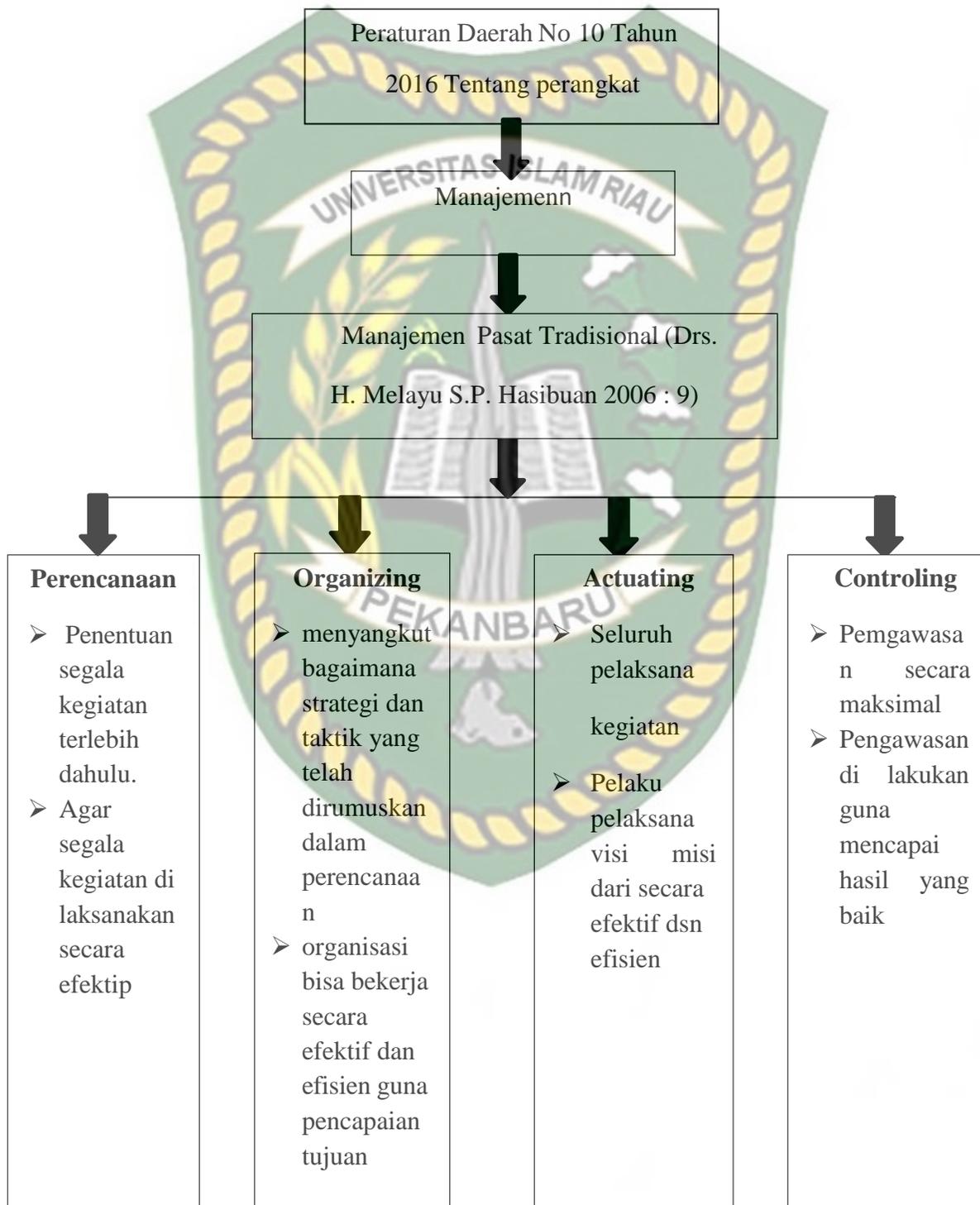
Table II.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1	ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PASAR JOHAR OLEH DINAS PASAR KOTA SEMARANG	a. Fokus penelitian pada pengelolaan pasar tradisional. b. Sama-sama subjeknya pada dinas perdagangan	a. Lokasi penelitian tidak sama
2	Pengelolaan pasar oleh dinas perindustrian dan perdagangan di kabupaten lebak	a. Fokus pada pengelolaan pasar b. Lokasi penelitian fokus pada pasar.	a. Target dari subjek penelitian berbeda.
3	Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang	a. Fokus pada strategi pengelolaan pasar	a. Lokasi penelitian berbeda.

Modifikasi Penulis 2021

C. Kerangka Berpikir

Gambar II.1 : Kerangka pemikiran penelian tentang manajemen pengelolaan pasar tradisional di sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan



D. Konsep Oprasional

Guna menjauhi dari salahnya pengertian dalam konsep-konsep yang ada di dalam penelitian ini, maka akan di jelaskan kembali batasan-batasan terhadap konsep-konsep yang akan di oprasionalkan yang kemudian akan diuji kembali dalam teknik pengukuran.

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

2. Pasar merupakan tempat di mana sekumpulan masyarakat menjalin interaksi. Pasar juga adalah tempat berjumpa nya penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya interaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelolaan pasar.
3. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan adalah mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan pemerintahan daerahberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Pengelolaan Pasar adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi segala kegiatang yang menyangkut pembangunan atau pun pengembangan pasartradisional.

Adapun indikator yang dioprasionalkan dalam penelitian ini adalah:

1. Perencanaan yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. Organizing yaitu pengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan itu.
3. Implementasi Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan dan pengembangan tenaga kerja.
4. Controlling atau pengawasan Yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan- tujuan, menentukan sebab-sebab, penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korelatif.

E. Oprasional Variabel

Tabel II.2: Oprasional variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para	Pengelolaan	a. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penentuan Kegiatan ➤ Penetapan Sumberdaya

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan 2006: 9)		b. Organizing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelompokan Individu ➤ Implementasi Rencana Kegiatan
		c. Actuating	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Kualitas ➤ Proses Motivasi
		d. Controlling	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan Kegiatan ➤ Alternative Solusi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat Deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih mem+perhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel- 43 variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi

yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna.

B. Lokasi Penelitian

Dari permasalahan yang telah ada, maka peneliti melakukan penelitian ini Dilakukan di Pasar baru Sorek Satu Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang meliputi Manajemen Strstegi Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabuaten Pelalawan. Alasan mengambil lokasi di lokasi tersebut di karnakan adanya terindikasi permasalahan seputar kurang efektif nya pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di pasar sorek satu pangkalan kuras tersebut.

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Informan merupakan seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami serta juga berpengalaman yang lebih mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subjek informasi mengenai manajemen strategi pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di sorek satu kecamatan pangkalan

kuras kabupaten pelalawan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian kali ini ialah pelaksana dari pengelolaan pasar sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.

2. Key Informan

Key informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam menentukan key informan yaitu orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga menguasai kegiatan tersebut.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di pasar sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan. Untuk melihat informan dan key informan di dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan seperti dibawah ini:

Tabel III. 1: Keadaan Informan dan Key Informan

No	Subjek Penelitian	Jumlah	Status
1.	Kepala Bidang Perdagangan	1	Key Informan
2.	Pedagang Pasar	3	Informan
Jumlah		4	

Modifikasi Penulis 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan yang menjadi tujuan dari hasil penelitian ini adalah data primer dan data skunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan langsung dari responden melalui wawancara yang dilakukan dengan responden mengenai manajemen strategi pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.

b. Data Sekunder

Data kunder merupakan data yang didapatkan oleh penulis dari dokumen-dokumen, literatur dan juga pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang didapatkan dalam penelitian ini digunakan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Sebagai teknik pengumpulan data kualitatif sudah menjadi mainstream namun masih yang terpenting. Kualitas data riset kualitatif tak jarang ditentukan oleh hasil wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau

orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014). Metode wawancara/interview juga merupakan proses

2. Metode Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci

keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (yusuf, 2014).

3. Metode Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (yusuf, 2014).

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart.

Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang manajemen pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupatenpelalawan.

N O	Uraian	Nov-Dec				Jan-Feb				Mar-Jun				Jul-Sep				Okt-Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■																			
2	Seminar UP			■																	
3	Revisi UP							■													
4	Revisi Wawancara								■												
5	Rekomendasi Survey											■									
6	Survei Lapangan													■							
7	Analisis Data																			■	
8	Penyusunan Skripsi																				■

Modifikasi Penulis 2021



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kabupaten Pelalawan

Sebelum pemekaran terjadi, Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam bagian Kabupaten Kampar yang saat itu memiliki kawasan yang sangat luas. Kabupaten Pelalawan resmi dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999, yang kemudian disahkan melalui Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kotanya adalah Pangkalan Kerinci. Saat ini Kabupaten Pelalawan telah berkembang menjadi 12 daerah Kecamatan, terdiri atas 4 daerah Kecamatan Definitif serta 8 daerah Kecamatan Pembantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

Kecamatan Definitif :

1. Kecamatan Langgam dengan luas 916,61 km²
2. Kecamatan Bunut dengan luas 1.339,96 km²
3. Kecamatan Pangkalan Kuras dengan luas 2.158,68 km²
4. Kecamatan Kuala Kampar dengan luas 4.656,34 km²

Kecamatan Pembantu:

1. Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 616,40 km²
2. Kecamatan Ukui dengan luas 407,73 km²
3. Kecamatan Pelalawan dengan luas 930,63 km²
4. Kecamatan Pangkalan Lingsung dengan luas 472,73 km²
5. Kecamatan Kerumutan dengan luas 773,86 km²

6. Kecamatan Teluk Meranti dengan luas 217,49 km²
7. Kecamatan Bandar Petalangan dengan luas 365,26 km²
8. Kecamatan Bandang sekijang dengan luas, 98,90 km²

Saat ini Kabupaten Pelalawan telah berkembang pesat dengan pembangunan fisik yang cukup terlihat. Sebagai kabupaten yang masih baru, Pelalawan bisa dibilang sebagai kabupaten yang cukup maju. Kecamatan Pangkalan Kerinci terletak di hilir sungai Kampar yang berada di Kabupaten Pelalawan. Kecamatan ini terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Langgam
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sekijang
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci pada saat ini adalah 65 KM yang terdiri dari kelurahan dan desa. Adapun kelurahan dan desa itu antara lain:

1. Kelurahan Kerinci Kota
2. Kelurahan Kerinci Barat
3. Kelurahan Kerinci Timur

4. Desa Kuala Terusan
5. Desa Mekar Jaya
6. Desa Rantau baru
7. Desa Makmur

B. Sejarah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur organisasi yang memfasilitasi dan memotivasi pembangunan di Bidang Industri, khususnya Industri Kecil Menengah, Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan konsumen, dan sistem manajerial pengelola pasar yang baik, tertib, aman dan tangguh sehingga memberikan kontribusi kepada daerah.

Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan:

1. Visi

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang Mandiri, Produktif dan berdaya saing melalui peningkatan peran industry, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

2. Misi

- a. Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internal organisasi maupun pelayanan kepada public
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan industry yang mandiri, produktif, dan berbasis bahan baku loka, serta meningkatkan daya saing dengan produk luar.
- c. Meningkatkan pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen dalam rangka mamperlancar distribusi barang dan jasa
- d. Mewujudkan pengelolaan pasar yang tertib, aman, indah, dan nyaman

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;

3. Bidang Koperasi;
4. Bidang UMKM;
5. Bidang Perindustrian;
6. Bidang Perdagangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur – unsur Organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Tugas dan Fungsi masing –masing. Adapun Tugas dan Program Kerja Bidang yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu : Bidang Perdagangan

1. Kepala Bidang

Kepala Bidang Perdagangan memiliki tugas yaitu :

- a. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- b. Melaksanakan perizinan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan pelaksanaan metrologi legal.

Kepala Bidang Perdagangan memiliki Fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perdagangan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan;
- d. Penyusunan pedoman teknis program dalam mendukung pengembangan usaha perdagangan;
- e. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- f. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (skpb);
- g. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (stpww), untuk penerimaan waralaba dalam negeri dan luar negeri beserta lanjutannya;
- h. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pe-label-an barang berbahaya;

- i. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan beserta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- j. Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah serta melakukan operasi pasar;
- k. Pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- l. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan beserta kampanye pencitraan produk ekspor;
- m. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- n. Penyiapan pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- o. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan di bidang perdagangan;
- p. Memberikan pembinaan, dukungan dan fasilitasi ekspor dan impor;
- q. Pelaksanaan administrasi Bidang Perdagangan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi

Seksi Pengembangan dan Promosi Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melaksanakan program di bidang sektoral pengembangan perdagangan, pemasaran, promosi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;
- c. Melakukan pembinaan, sosialisasi kebijakan, peraturan perundang- undangan dan informasi lainnya terkait dukungan dan bantuan kerjasama dalam peningkatan perdagangan ekspor dan impor;
- d. Melakukan pendataan dan pelaporan ekspor dan impor;
- e. Menerbitkan dan membina perizinan di bidang perdagangan.
- f. Melaksanakan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan operasi pasar;
- g. Melaksanakan pemantauan, pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi;
- k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Kemetrologian dan Tata Niaga

Seksi Kemetrologian dan Tata Niaga mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Kemetrologian dan Tata Niaga berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (uttp) yang berada di masyarakat;
- c. Melaksanakan penyidikan dibidang metrologi legal;
- d. Melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol;
- e. Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan;
- f. Mengawasi pupuk bersubsidi, pestisida dan barang bersubsidi lainnya;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Kemetrologian dan Tata Niaga;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar Memiliki Tugas

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengelolaan Pasar berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menyiapkan rencana perizinan pasar dan kerjasama dalam pengelolaan pasar;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan pasar;
- d. Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pasar;
- e. Melaksanakan pemantauan dan penilaian pasar;
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- g. Melaksanakan pemantauan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
- h. Melakukan pendataan pasar dan pembinaan pengelola pasar;
- i. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar;
- j. Melaksanakan pemetaan pertumbuhan dan pengembangan pasar;
- k. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia tenaga retribusi pasar dan pengelola pasar;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengelolaan Pasar;
- o. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;

- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan dan key informan

Dalam sebuah penelitian, identitas informan sangatlah penting, dikarenakan agar pembaca merasa yakin atas informasi yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian, serta menguatkan hasil data yang didapat baik secara wawancara maupun pengumpulan data jenis lain, dan nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan maka hakikatnya, sangatlah penting menjelaskan identitas dari informan. Dalam hal ini key informan penelitian ini ada bapak Katan, S.Pd, yang menjabat sebagai Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Tabel V.1 informan

No	Nama	Status
1	Emrizal	Pedagang
2	Soegeng	Pedagang
3	Ernawilis	Pedagang

Modifikasi Penulis

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penggunaan asas otonomi daerah, yang tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, yang dalam hal ini terkait dalam pemberian hak-hak istimewa yang diantaranya ialah manajemen pengelolaan pasar tradisional oleh instansi terkait, yang dalam hal ini ialah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, kabupaten pelalawan. Manajemen sendiri diperlukan untuk mencapai tujuan pasar yang diinginkan, baik dari segi peningkatan taraf ekonomi masyarakat, hingga

menjadi pasar yang ramah lingkungan, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten pelalawan.

Demi mencapai tujuan yang telah direncanakan serta yang telah diharapkan dalam pembangunan pasar, yang dalam hal ini adalah pasar tradisional yang terletak di Sorek Satu Kabupaten Pelalawan, dibutuhkan manajemen pasar yang bagus, yang dalam hal ini, menjadi fokus penelitian oleh penulis. Sebagai fokus manajemen yang digunakan penulis ialah konsep manajemen yang dikemukakan oleh Drs. H Melayu S.P Hasibuan, yang befokus pada manajemen strategi pasar tradisional.

Konsep manajemen yang digunakan penulis mengandung beberapa unsur dalam melakukan manajemen pasar tradisional seperti:

1. Perencanaan

Ialah penentuan segala kegiatan terlebih dahulu, yang terkait dalam manajemen pasar, agar proses manajemen menjadai lebih efektif.

2. Organizing

Menyangkut bagaiman strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan, yang menghubungkan antar kerjasama kelompok atau individu dengan tujuan yang sama

3. Actuating

Seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada tahap planning, yang menyesuaikan dengan pengelompokan kerja pada tahap organizing

4. Controlling

Pengawasan secara maksimal terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dengan menyesuaikan pada tahap perencanaan, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan pada konsep manajemen yang telah dipilih oleh penulis sebagai landasan dalam melakukan penelitian terkait manajemen pengelolaan pasar tradisional di sorek satu kabupaten pelalawan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Maka didapatkan hasil sebagai berikut.

1. Perencanaan

Pada perencanaan manajemen pasar tradisional, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, yang memiliki beberapa tujuan yang sudah sangat ingin dicapai oleh pihak instansi terkait, adapun tujuan pertama ialah meningkat kualitas pasar menjadi pasar ramah lingkungan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar pasar, dengan meningkatkan minat beli dari masyarakat, serta meberikan sosialilas dalam peningkatan kualitas barang dagangan serta persaingan harga.

a. Penentuan Kegiatan

Sub indikator pertama dalam perencanaan ialah penentuan segala kegiatan, dalam hal ini, pihak terkait, yang dalam hal ini merupakan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan menentukan jenis kegiatan yang ingin dilakukan, serta tujuan dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan pada pengakuan dari bapak Kastan, S.Pd, yang menjabat sebagai Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

“ Tentu tujuan awal berdirinya sebuah pasar, ialah sebagai tempat jual beli, dan sumber ekonomi masyarakat, namun sekarang ini, sebagai rencana awal dari pengelolaan pasar menjadi lebih baik, kita sedang mengusakan peningkatan unsur pasar ramah lingkungan, seperti adanya kios, drainase, jalan, toilet, mushola, lahan parker. Dan kondisi sekarang kita sudah memenuhi hal-hal tersebut tadi, dan rencana untuk kedepannya kita berusaha untuk meningkatkan unsur-unsur tadi, agar menjadi pasar yang ramah lingkungan.”(Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan saat mengunjungi pasar tradisional tersebut ialah, pasar tradisional tersebut memang memiliki unsur yang disebutkan oleh pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, namun pada kenyataannya, kondisi yang terjadi dilapangan yang penulis temukan, unsur unsur tersebut cukup kurang, dan sangat membutuhkan perhatian khusus, demi mencapai pasar yang diinginkan.

Bisa dikatakan kondisi unsur tersebut bisa mengganggu kelancara serta kenyamanan dalam bertransaksi, bisa dilihat dari bangunan yang kurang baik, dengan atap yang terbuka, dinding papan yang menggantu dan tidak pada posisinya lagi, drainase yang tersumbat, sehingga menggagu warga sekitar, skondisi jalan yang berlumpur, kios yang kurang memadai, serta kebersihan toilet yang kurang baik.

Kondisi dari unsur-unsur pasar tersebut menjadi perhatian lebih dari para pedagang dan konsumen, yang menimbulkan keluhan, dan merasa sangat terganggu

dengan keadaan tersebut. Pernyataan observasi ini juga didukung oleh keterangan dari pedagang, yang dalam hal ini merupakan ketua pasar, dan menjadi tempat aduan dari para pedagang perihal apapun.

“Sangat benar jika kondisi pasar saat ini membutuhkan perhatian lebih, kita bisa melihat sendiri bagaimana kondisinya, apalagi kondisi sekarang, sudah mulai banyak keluhan dari pedagang-pedagang, terutama pedagang yang tidak mendapatkan kios, baik dengan alasan lokasi kios yang tidak strategis, hingga kondisi kios yang memang kurang baik sehingga beberapa pedagang malas untuk menempatkannya.” (Emrizal, ketua pasar, 03-10-21)

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis mencoba melakukan wawancara kepada beberapa pedagang, mengenai kondisi pasar, serta mengetahui alasan pedagang terhadap ketidak inginan pedagang menggunakan kios tersebut.

“ lokasi kios yang tidak strategis, dan dirasa kurang menguntungkan, sehingga saya dan beberapa pedagang malas untuk memilih kios tersebut, dan memilih berjualan di daerah depan, dan membuat lapak sendiri dari kayu, ini dirasa lebih menguntungkan dan mudah terlihat oleh pembeli.” (Soegeng, pedagang, 03-10-21)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penullis pada lokasi penelitian ini, pada poin input dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pemilihan rencana yang diambil oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang berupa peningkatan kualitas dari unsur-unsur yang terdapat pada pasar tradisional yang nantinya diharapkan menjadi pasar ramah lingkungan yang berkualitas.

Pemilihan rencana ini juga menjadi solusi yang sangat dibutuhkan baik oleh pedagang maupun konsumen demi kenyamanan dari transaksi jual beli yang terjadi pada pasar tersebut.

Peningkatan kualitas ini, yang terutama berkaitan tentang infrastruktur yang terdapat dari pasar tradisional ini, yang hamper semua pedagang berharap adanya penambahan kios pada pasar tersebut. Dengan adanya peningkatan pada aspek jumlah kios, maka akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak pedang, yang nantinya akan menarik lebih banyak orang untuk berjualan di pasar tradisional tersebut, akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar yang berpropesi sebagai pedagang. Penambahan jumlah kios ini juga akan berpengaruh pada retribusi yang masuk dalam PAD Kabupaten pelalawan, yang akan bertambah seiring dengan pertambahan pedagang yang berjualan di pasar tradisional yang terletak di sorek satu kabupaten pelalawan ini.

Maka penulis berkesimpulan bahwa indikator pertama yang terdapat pada konsep manajemen yang digunakan penulis sebagai landasan penelitian, yang dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan telah memiliki dasar perencanaan yang tepat, dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar tradisional saat ini. Tujuan perencana kedua dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dinilai telah berhasil, walau dengan kondisi pasar yang masih dalam kondisi yang kurang seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, berdasarkan pada pengakuan pihak Dinas terkait

“rencana kita yang lain tentu saja meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, terutama yang berada disekitar pasar, yang awalnya tidak memiliki penghasilan lebih, kini memiliki penghasilan tambahan, kita juga dapat laporan bahwa banyak masyarakat yang merasa tertolong, karena yang awalnya tidak ada penghasilan menjadi ada, yang awalnya penghasilan kurang, kini mendapat penghasilan tambahan, dan tujuan kita yang lain, dengan peningkatan kualitas pasar, maka diharapkan para pedagang dapat meningkatkan daya saing serta kualitas dagangannya.” (Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Pernyataan tersebut sudah cukup menggambarkan bagaimana tujuan kedepan yang akan diambil oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, dengan begitu harapan agar pasar tradisional yang ada saat ini, dapat segera menjadi pasar yang diharapkan dan direncanakan oleh pihak terkait.

b. Penetapan Sumberdaya

Pada sub Indikator kedua ini, pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan melakukan persiapan berupa sumberdaya yang dibutuhkan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, mengenai sumberdaya, maka didapati jawaban sebagai berikut.

“ persiapan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, terdapat dua hal penting sebagai persiapan utama, yang pertama anggaran, serta yang kedua ialah sumber daya manusia, sebagai penggerak kebijakan yang nantinya dilaksanakan, kita fokus pada dua hal tersebut, dengan begitu, dirasa dapat mencapai tujuan dengan mudah. “. (Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21).

Berdasarkan pada pengakuan diatas, pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini telah membuat focus persiapan yang dirasa paling penting dalam mencapai tujuan, dengan kondisi anggaran yang memadai serta, sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan memberikan dorong yang kuat dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan pada dua hal sub indicator yang telah dipaparkan oleh penulis diatas yang berlandaskan pada data yang telah dikumpulkan melalui wawancara serta observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator perencanaan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan perencanaan menjadi pondasi awal dari indicator yang lainnya, yang dalam hal ini dinas terkait telah menentukan peningkatan infrastruktur pasar serta menaikkan taraf hidup masyarakat yang menjadi bagian dari pasar yang dalam hal ini ialah pedagang dan pembeli, yang dalam mencapai hal tersebut di tunjang oleh anggaran pemerintah daerah, maupun pusat, serta penggunaan SDM yang berkualitas demi menjami keberlangsungan kegiatan.

2. Organizing

Organizing adalah proses pengelompokan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada dengan tujuan agar rencana yang telah dibuat terpenuhi dengan efektif dan efisien. Organizing menjadi peran penting lainnya agar terciptanya kejelasan antar sesama anggota maupun petugas, serta orang-orang yang bertanggung jawab yang memiliki kejelasan tugas dan fungsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar sesama, serta mendapat keselarasan tugas dan fungsi agar proses

penerapan rencana yang telah dilakukan pada tahap planning dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Penerapan organizing yang baik, diharapkan terjadi hal-hal seperti berikut, seperti

- a. perekrutan penyeleksian sumberdaya manusia,
- b. meberikan kesesuaian tenaga kerja dengan kampuan individu,
- c. menyusun dan menetapkan tugas serta pengalokasian tenaga kerja sesuai dengan prosedur.
- d. menentukan struktur sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing masing

Adapun manfaat dari organizing dalam manajemen jika dilakukan dengan baik ilah :

- a. tugas yang terlaksana dengan spesialisasi masing-masing
- b. terciptanya tranparansi pembagian tugas yang jelas
- c. pembagian tugas yang dapat disesuaikan dengan kondisi instansi
- d. tenaga kerja yang paham akan tugasnya masing-masing.

a. Pengelompokan individu

Sub Indikator pertama ialah pengelompokan individu, bertujuan agar terjadinya kerja sama tim, dengan tujuan agar lebih efektif serta efesian, dalam hal ini juga melakukan penyeleksian individu yang memiliki keahlian dalam bidang yang sama dalam satu kelompok, agar tidak terjadinya gangguan dari salah satu anggota

tim yang tidak dapat mengimbangi tugas pokok dan fungsi yang ada dalam kelompok tersebut.

Adapun hasil wawancara yang didapat penulis mengenai Pengelompokan individu, yang dilakukan dalam manajemen pasar tradisional seperti pernyataan yang di utarakan oleh pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

“Pada tahap ini, tentu kita sudah berusaha sebaik mungkin, baik dalam pemilihan individu yang akan bertugas, hingga tugas yang diberika, sudah di usahakan kesesuaiannya, seperti kita punya petugas yang lansung menangani pengelolaan pasar itu sendiri, baik di bidang kebersihan, keamanan, retribusi, parkir, pengawasan. Dengan begitu mereka memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pihak dinas hanya menerima laporan yang diberikan oleh petugas.” .”(Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Berdasarkan pada observasi yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian, bahwa adanya petugas yang disampaikan oleh peihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan kabupaten pelalawan, yang terlihat bagaimana para petugas mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti petugas kebersihan, keamana, serta petugas yang lain.

b. Implementasi Rencana Kegiatan

Sub Indikator kedua ialah penerepan rencana kegiatan bagi kelompok yang telah ditentukan, dengan begitu, akan terlihat seberapa efektif dan efesiennya suatu kelompok yang telah terbentuk pada tahap pengelompokan individu.

Berdasarkan pada pernyataan pedagang yang berjualan di pasar tradisional tersebut terkait petugas pengelolaan pasar.

“keberadaan petugas sering terlihat saat melaksanakan pekerjaannya, yang paling sering dilihat pedagang ialah petugas kebersihan, keamanan, dan retribusi, serta parkir, sajuh ini mereka bekerja dengan baik, hanya saja pada bagian kebersihan, terasa sangat kurang, karena masih banyak sampah yang berserakan, serta menggunung” (Soegeng, pedagang. 27-09-21)

Observasi yang dilakukan oleh penulis dalam melihat kinerja yang dilakukan oleh petugas pengelola pasar memang sudah bekerja sesuai dengan kewenangannya, namu kembali lagi, melihat pada apa yang terjadi dilapang, pada pasar tradisional tersebut, hal yang paling bisa dinilai dengan sangat mudah adalah kondisi kebersihan pasar itu sendiri, baik perawatan kebersihan pada bagian dalam pasar maupun bagian luar pasar.

Melihat bagaimana pengelolaan kebersihan berjalan, cukup sulit dikatakan berjalan dengan sangat baik, karena kita bisa melihat samapah yang cukup banyak terutama pada bagian luar, yaitu tempat pengumpulan sampah sementara, dimana sampah sangat sulit untuk dibersihkan, dan dirasa tidak ada habisnya, sampah-sampah terus berdatanagn dan cukup mempersulit petugas kebersihan, sehingga menjadi suatu hal yang sangat perlu mendapat perhatian lebih dari pihak pengelola pasar itu sendiri, demi kenyamanan bersama.

Dengan data observasi yang dimiliki penulis mengenai kondisi pasar pada saat dilakukan observasi, pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan kabupaten pelalawan memberi tanggapan mengenai kasus kebersihan.

“ pada permasalahan kebersihan yang kita bicarakan saat ini, bahwa petugas yang kita beri wewenang sekarang, sudah mengerjakan tugas dengan sangat baik, dan kita sudah melakukan riset bahwa petugas kebersihan yang ada mampu untuk melaksanakan kegiatan kerbersihan dan mampu mengangkut semua sama pah yang dihasilkan oleh pasar tiap harinya, namu laporan yang kita dapat, bahwa masyarakat setempat, yang bukan bagian dari pasar, dan bukan pedagang, ikut serta membuang sampah di tempat pengumpulan sampah sementara, sehingga sampah yang ada melebihi kesanggupan kuota yang mampu ditangani oleh petugas kebersihan” .(Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses organizing yang dilakukan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sudah sesuai dengan konsep organizing itu sendiri, dengan menempatkan kelompok dan satuan tugas yang mampu menangani tugas yang diberikan, dan jika difokuskan pada problem kebersihan yang ada pada pasar, permasalahan utama ialah kelebihan kuota sampah yang terjadi di pasar tradisional oleh sebagian masyarakat yang ikut membuang sampah di tempat pengumpulan sampah sementara pasar tradisional tersebut, yang menjadikan sampah akan terus bertambah dan sukar untuk dikurangi, dan akan memberatkan petugas yang berwenang.

Menanggapi hal ini, yang mana berdasarkan pernyataan dari pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, penulis

kembali melakukan wawancara terhadap pedagang mengenai pernyataan dari instansi terkait.

*“memang ada masyarakat yang ikut membuang sampah rumah tangga dipasar, dan kebetulan tetangga saya juga melakukan hal yang sama, adapun alasannya sederhana, karena tidak perlu mebayar iuran kebersihan, karena itu mereka memilih untuk membuang sampah rumah tangga di pasar.”
(Ernawilis, Pedagang, 03-10-21)*

Berdasarkan pada wawancara dengan salah seorang pedagang, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tidak sepenuhnya salah dalam hal ini, yang menyebabkan penumpukan sampah, bahwa masyarakat setempat juga mengambil bagian dalam permasalahan ini, dengan begitu kedepannya, harapan kedepannya ialah petugas pengelola pasar bisa lebih tegas dalam menindak masyarakat yang tidak taat aturan, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi semua orang.

Sementara pada tugas-tugas aspek lain seperti parkir, berdasarkan hasil observasi penulis memiliki masalah yang tidak begitu besar, dimana masyarakat yang ingin berbelanja memarkirkan liar motornya, serta kepadatan pembeli yang mengakibatkan ruang parkir yang mulai sempit, sehingga membutuhkan sedikit perhatian mengenai hal itu. Dan pada tugas lain tidak begitu ditemukan permasalahan yang berarti, baik dari segi keamanan, yang dari lapora Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan belum ditemukan adanya pungutan liar, atau tidak criminal yang mengancam jiwa.

Berdasarkan pada dua sub indikator yang telah dipaparkan di atas, yang berdsarkan pada pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, maka dapat disimpulkan bahwa subindikator telah dilaksanakan, seperti pengelompokan individu yang terlihat dari bagaimana terciptanya kelompok yang dibedakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi seperti bagian kebersihan, keamanan, izin lapak, dan kelompok lain yang memiliki tugas berbeda, serta palaksanaan kegiatan yang telah berjalan seperti petugas kebersihan, keaaman dan petugas lain, walau dalam hal ini memiliki beberapa kendala, seperti yang mudah terlihat adalah sampah pasar yang tidak sedikit dikarenakan keikutsertaan masyarakat sekitar yang turut membuang sampah di pasar.

3. Actuating

Actuating berfungsi sebagai pengarahan, Actuating diartikan sebagai pengarahan terhadap orang lain. Pada dasarnya pengarahan sangat erat kaitannya dengan unsur manusia yang ada dalam organisasi. Kegiatan organisasi sangat ditentukan oleh sejauh mana unsur manusia dapat mendayagunakan seluruh unsur-unsur lainnya, serta mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Actuating merupakan keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginan - keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang organisasi.

Dalam hal ini, maka Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran untuk membimbing jajarannya, baik dalam motivasi, hingga sosialisai

mengenai kebijakan yang diterapkan, hingga tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh tiap individu atau kelompok yang terdapat dalam jajarannya, yang dalam hal ini berfokus pada unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan pasar tradisional sorek satu, demi mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam unsur planning, dengan begitu diharapkan jajaran pengelolaan pasar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, serta memiliki motivasi kerja yang tinggi.

a. Peningkatan Kualitas

Merupakan sub indikator dalam fungsi actuating, yang mana melakukan pengarahan terhadap bawahan atau terhadap individu yang bekerja atau bagian dari kebijakan yang berlaku yang telah diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas, agar memiliki tingkat kualitas yang tinggi, baik dengan pelatihan, maupun dengan arahan.

Berdasarkan pada pengakuan pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan mengenai hal ini ialah

“ Kita sudah berusaha sebaik mungkin dalam meningkatkan kualitas petugas pengelola pasar, berupa sosialisai kegiatan dan kebijakan, yang nantinya diharapkan petugas dapat bekerja dengan baik, namu harus kita ingat bahwa perdagangan juga bagian dari pasar itu sendiri, dan memiliki peranan tersendiri dalam pengelolaan pasar, sehingga pedagang tidak luput dari kewajiban dinas untuk melakukan sosialisasi, baik dalam kebijaka, maupun audit harga barang, agar terjadi persaingan yang sehat dan meningkatkan kualitas produsen.” (Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagagn Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Berdasarkan pada hasil observasi yang penulis lakukan, bahwa kegiatan sosialisasi yang dikmaksudkan oleh pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan

Perdagangan tersebut, benar adanya, menurut pengakuan pedagang bahwa sosialisasi pernah terjadi, dan biasa dilakukan dalam waktu 4 kali dalam satu tahun, sosialisasi yang dilakukan seringkali tentang etika berdagang, kebijakan-kebijakan terkait dalam proses perdagangan, yang dalam hal ini saat pada masa pandemic covid 19, yang mengharuskan penerapakan protocol kesehatan yang ketat, sehingga proses kegiatan jual beli yang terjadi dipasar tetap bisa berjalan, walau pernah mengalami kendala, seperti penurunan ekonomi masyarakat pasar yang turun hamper 50% berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

Dengan semua usaha yang ada, dan yang telah dilakukan oleh pihak instansi terkait, dalam pelaksanaan unsur Actuating, diharap agar masyarakat dapat patuh dan melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh dengan harapan kegiatan pengelolaan pasar dan kegiatan jual beli dipasar dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan pengakuan dari pedagang mengenai sosialisasi terhadap pengelolaan pasar seperti yang di ungkapkan oleh seorang pedagang

“ Sosialisai rutin dilakukan oleh pihak Dinas, mengenai hal-hal berkaitan dengan harga, dan menjaga kondisi pasar, serta tentang etika berdagang, tentu saja ada yang tidak begitu memperdulikan hal tersebut, dan tetap seperti biasa” (Ernawilis, Pedagang, 03-10-21)

Dengan begitu adanya data observasi serta wawancara yang didapati oleh penulis, dapat disimpulkan jika peran sosialisasi dalam pengelolaan pasar, terutama pada urusan menjaga kondisi pasar, baik dari ketertiban, harga, etika, hingga

kebersihan sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pasar menjadi lebih baik lagi, dengan harapan bisa menjadi pasar yang ramah lingkungan dengan unsur-unsur pasar terpenuhi dengan baik, dan dapat ditingkatkan.

Namun yang perlu disadari dalam hal ini, membentuk karakter manusia yang dalam hal ini pedagang serta petugas pasar tidak mudah, walau sudah dilakukan sosialisasi tentang berbagai hal, masih banyak pelanggaran yang terjadi, hal kecil yang bisa dilihat ialah tidak terjaganya kebersihan pasar, yang mana pembeli maupun penjual kadang masih banyak yang membuang sampah sembarangan, dan bersifat apatis terhadap oknum yang melakukan kegiatan pelanggaran tersebut, sehingga permasalahan kebersihan akan sulit untuk diselesaikan.

Permasalahan lain mengenai tataletak dan penggunaan kios, yang mana para pedagang lebih rela membuat lapak sendiri di bahu jalan, atau di samping gedung utama pasar tradisional dan tidak menggunakan kios-kios yang ada, dengan berbagai alasan, baik kios yang dirasa kurang layak, hingga letak kios pedagang yang dianggap tidak menarik pembeli dengan baik, sehingga banyak dari pedagang yang berpindah tempat dagangannya, pelanggaran lain yang dapat ditemukan ialah bagaimana pedagang yang sudah memiliki kios, menyewakan kios dagangannya kepada pedagang baru, atau kepada pedagang yang berminat, yang sebenarnya kegiatan ini melanggar aturan, bahwa kios yang ada diperuntukkan bebas bagi setiap masyarakat yang ingin berjualan, dan tidak boleh disewakan kepada orang lain.

“Hal tersebut sering terjadi dan sering ditemu saat kita dari pihak Dinas datang berkunjung, baik saat melakukan sosialisai atau dari laporan petugas pengawasan, bahwa banyak terjadi kasus sewa kios yang dilakukan oleh pedagang, yang sebenarnya kita sadari bahwa cukup mudah untuk mendapat kios di pasar tradisional tersebut. Dan kita juga berusaha agara renovasi kios yang telah masuk dalam rencan anggaran agar dapat segera terlaksana, dengan harapan menarik minat pedagang untuk berjualan di kios yang disediakan, dan bukan ditempat lain” (Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Melihat hal tersebut, akan sangat menggau ekosistem pasar, dan dengan adanya kios-kios yang tidak digunakan, akan berdampak pada retribusi yang diberikan oleh pasar, yang jika kios kios dapat digunakan secara maksimal akan meningkatkan PAD daerah Kabupaten Pelalawan.

b. Proses Motivasi

Pada sub indikator ini, berfungsi sebagai cara dalam meningkatkan semangat kerja pegawai, dengan memiliki motivasi besar yang pada setiap anggota, makan harapannya berupa peningkatan hasil kerja pada tiap-tiap individu, dengan begitu akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

Berdasarkan pada pengakuan pihak terkait, mengenai sub indikator tersebut, didapati jawaban dari hasil wawancara seperti yang disampaikan oleh Kabid Perdagangan

“ Sebelum melakukan kegiatan, terutama dialpan, kita selalu melakukan breefing terlebih dahulu, dan disela-sela itu, kita juga memotivasi anggota agar semangat dalam menjalankan tugas yang telah ditentukan, baik berupa pujian, atau kalimat yang mebangkitkan semangat.” .”(Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Tidak bisa dipungkiri pedagang juga merupakan bagian dalam ekosistem pasar, yang memiliki peran tersendiri dalam pengelolaan pasar, dengan begitu, pedagang juga tidak luput dari proses motivasi tersebut.

“ kita sering mendapat kata-kata motivasi, baik dalam meningkatkan mutu produk, semangat menghidupi keluarga, hingga pujian saat berdagang, bagi saya itu sangat menyenangkan, saya merasa lebih dihargai.” (Ernawilis, Pedagang, 03-10-21)

Berdasarkan pengakuan tersebut, dapat diambil kesimpulan jika proses actualing yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan memiliki dampak positif pada sebagian pedagang dalam hal motivasi, terutama pada pedagang yang kami wawancarai, dengan peningkatan motivasi yang dimiliki oleh pedagang, diharapkan pedagang memiliki semangat yang lebih dalam hal perekonomian pribadinya, hingga peningkatan kualitas produk yang dimilikinya.

Berdasarkan pada sub indicator yang telah dijelaskan berdasarkan pada pengumpulann data yang telah dilakukan melalui wawancara serta observasi, yang dalam hal ini kegiatan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan kegiatan berupa peningkatan kualitas, terutama pada petugas-petugas yang berada dilapangan dengan terus melakukan pengarahan, serta kegiatan untuk memotivasi baik pedagang maupun petugas terkait, demi mancapai tujuan yang telah ditentukan di awal.

4. Controlling

fungsi controlling menjadi unsur terakhir dalam prinsip manajemen, yang mana controlling berfungsi sebagai kegiatan pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan pada perencanaan serta pengorganisasian, baik kelompok kerja, maupun tugas dan fungsi, agar terjadi control atas wewenang yang telah diberikan, sehingga proses kegiatan berjalan seperti yang diharapkan, demi mencapai tujuan yang diinginkan, adapun manfaat lain dari controlling ialah:

1. Mengevaluasi keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuan dan target sesuai dengan indikator
2. Mengkoreksi penyimpangan yang terjadi
3. Penerapan alternative solusi sesuai keadaan
4. Mengawasi pejabat atau petugas yang berwenang
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan.

a. Pengawasan Kegiatan

Pengawasan kegiatan, merupakan bentuk control terhadap kebijakan yang dijalankan, serta melihat kondisi yang ada dilapang, baik menggunakan data laporan atau langsung melaksanakan sidak pada lokasi pasr itu sendiri. Sub indikator ini bertujuan untuk menjaga agar tujuan yang telah ditetapkan, yang menghasilkan kebijakan serta pemberian tugas pada individu dan kelompok yang telah ditentukan sebelumnya berjalan pada rute semestinya, dan mengetahui segera jika terjadi penyelewengan.

Berdasarkan pada pengakuan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai unsur controlling

“kegiatan pengawasan dan control terhadap pengelolaan pasar sudah kita usahakan sebaik mungkin, adapaun bentuk pengawasannya berupa kunjungan langsung ke pasar tradisional tersebut, serta menerima laporan rutin dari petugas pengawasan pasar yang sudah kita tunjuk guna melakukan fungsi controlling, disitu kita bisa tahu kondisi pasar saat ini bagai mana.” (Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagagn Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Dengan adanya controlling yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, diharapkan agar kinerja pihak yang berwenang menangani pengelolaan pasar dapat lebih baik lagi. Berdasarkan observasi penulis, kegiatan Controlling yang dilakuka oleh dinas harus bisa diperketat lagi, dikarenakan penulis melihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang, yang sudah disinggung diawal mengenai penyalah gunaan kios, ketertibab pedagang dalam mengatur tataletak dagangan, serta terdapat nepotisme dalam mendapat izin penggunaan kios di pasar tradisional tersebut.

Berdasarkan dari pengakuan pedagang yang kita wawancarai mengenai nepotisme yang terjadi dalam mendapat kios dipasar

“Untuk mendapatkan izin pemakaian kios di pasar tradisional tersebut, tidak terlalu sulit, tapi juga tidak mudah, dengan maksudnya saya, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami, kedekatan dengan petugas pasar bisa menjadi cari paling ampuh untuk mendapat hak penggunaan kios, bukan berarti kalau tidak dekat menjadi tidak mungki, hanya saja menjadi lebih sulit untuk mendapatkan izin tersebut.” (Emrizal, Pedagang, 03-10-21)

Melihat pengakuan dari salah seorang pedagang di pasar tradisional tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek nepotisme masih sering terjadi, walau mendapatkan hak pakai kios masih tetap bisa didapat dengan tanpa adanya kedekatan dengan petugas pasar, namun tetap saja, dengan kedekatan yang ada akan mempermudah proses pendapat izin penggunaan kios di pasar.

Berdasarkan pada data yang telah di dapat penulis pada indikator controlling, dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan harus meningkatkan kualitas kegiatan pengawasannya, agara tidak terjadi lagi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh petugas pengelola pasar, dengan meningkatkan ketegasan dalam proses controlling makan, harapan kedepannya akan membuat para pedagang serta pemegang wewenang dapat bekerja sama dan meningkatkan kualitas tanggung jawabnya, dengan begitu tidak akan terjadi penyimpangan dari tujuan awal, yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional serta meningkatkan kualitas pedagang dan petugas pengelola, baik dari taraf hidup masyarakatnya dengan peningkatan ekonomi, serta peningkatan kualitas penggunaan wewenang yang telah diberikan kepada petugas pengelola pasar, agra kualitas pasar dapat terjaga dan tidak terulang lagi penyalahgunaan wewenang.

b. Alternatif Solusi

Dengan dijalankannya fungsi controlling serta penerapan pada sub indikator pertama pada fungsi controlling, maka sub indikator kedua merupakan lanjutan dari sub indikator pertama, yang mana berfungsi sebagai umpan balik yang diberikan oleh

Dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, dengan melihat hasil yang didapat, baik melalui sidak, ataupun laporan pengawasan. Dengan begitu pihak terkait dapat segera mengambil langkah dalam mengatasi kesalah yang terjadi selama pelaksanaan tugas, yang dalam hal ini ialah pengelolaan pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap dinas terkait, maka didapati wawancara yang dalam hal ini, disampaikan oleh Kabid Perdagangan.

“ Dari hasil laporan yang kita terima, baik masalah besar ataupun kecil, secepatnya kita berikan solusi, seperti yang bisa saya contohkan, hasil laporan bahwa pedagang mengeluhkan kondisi bangunan yang mulai rusak berat, segera kita buat pengajuan untuh anggaran perbaikan bangunan, atau sampah yang terus menjadi masalah besar yang sering terjadi, seperti sampah yang melebihi kuota harian, untuk sementara kita hanya bisa meminta petugas terkait untuk bekerja sedikit lebih extra” (Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Berdasarkan pada pengakuan diatas, bahwa seolusi yang diberikan sebagai alternative, hanya bersifat sementara, dan masih dibutuhkan solusi yang benar-benar telah dirancang dengan baik demi mengatasi masalah yang ada. Sehingga dikemudian hari, masalah yang sama tidak lagi muncul sebagai penghalang dari tujuan untuk menciptakan pasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Berdasarkan pada sub indikator yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait sangat lah penting dan memiliki pengaruh besar, dengan alasan menjaga agar setiap unsur dari pasar dan proses pengelolaan pasar tetap berda dijalur yang sudah ditentukan, dan Dinas

Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan telah melakukan pengawasan kegiatan, sekurang-kurangnya empat kali dalam satu tahun, namun hal ini juga diiringan dengan masalah lemahnya pengawasan yang terlihat bagaimana nepotisme kadang masih terlihat, terutama dalam mendapat izin lapak. Alternative solusi yang menjadi sub indikator kedua juga telah diusahakan oleh dinas terkait, dimana peningkatan beban kerja sementara bagi petugas kebersihan agar sampah yang melebihi kuota harian dapat tetap bias di tangani.

C. Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Manajemen Pasar

1. Perencanaan

Planning merupakan langkah awal dari proses manajemen, dimana terjadi penentuan awal rencana kedepannya akan seperti apa, yang telah diketahui bahwa rencana yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan ialah meningkatkan kualitas pasar, dari segi infrastruktur. Penunjang kegiatan jual beli yang terjadi di pasar, seperti penambahan kios, perbaikan bangunan, peningkatan kebersihan, perbaikan drainase, hingga lahan parkir.

Program kedua adalah peningkatan kualitas pedagang, baik dari segi produk maupun pemasaran, dengan meningkatnya kualitas barang yang dijual oleh pedagang, dapat meningkatkan minat beli masyarakat terhadap produk tersebut, yang berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat pasar itu sendiri.

Namun perlu diketahui bahwa permasalahan sudah terlihat dari awal perencanaan, hal yang paling mendasar ialah anggaran yang tidak yang tidak memadai dan seadanya, sehingga akan cukup sulit untuk bisa langsung melakukan renovasi pada pasar tersebut.

“ kita sedang berusaha dalam penganggaran dana dalam APBD perubahan, yang masih belum rampung, namu keterbatasan dana akan tetap menjadi penghalang dalam proses peningkatan kualitas infrastruktur, selain dana yang terbatas, dana tadi juga harus dibagi kepada lebih dari 80 pasar, sehingga kita harus menentukan mana pasar yang harus didahulukan” (Kastan, S.Pd Kepala bidang Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Kendala lain juga terjadi dari karakter masyarakat yang berada dilingkungan pasar, bagi pedagang maupun pembeli, yang mana sulit untuk mengontrol tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran, seperti penyalahgunaan kios, tidak menjaga kebersihan dalam proses perdagangan juga terdapat banyak pelanggaran, baik dari timbangan, hingga produk yang enggan dinaikkan kualitasnya.

“ Tentu kendala yang lainnya selain anggaran adalah karakter manusia yang susah di atur, tidak bermaksud menyalahkan hanya pihak masyarakat sekitar dan pedagang, dari pihak kita sebagai pemegang wewenang juga kadang belum sempurna, namu kita sering mendapat laporan dari petugas pengawasan bahwa masih sering kesalahan dan pelanggaran sering terjadi dari pihak masyarakat, terutama sampah.” (Kastan, S.Pd Kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. 29-09-21)

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan, hambatan yang langsung terlihat berupa terkendala anggaran serta ketidak inginan sebagai pihak

masyarakat untuk bekerja sama dengan Pihak berwenang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Organizing

Organizing merupakan unsur berikutnya dalam konsep manajemen, dengan kegiatan berupa pengelompokan individu yang ada dengan tugas yang menjadi spesialisasinya, sehingga peran dari organizing sangat penting pada proses manajemen, dengan memilih orang yang tepat dengan tugas dan fungsi yang tepat pula, maka akan didapatkan hasil yang efektif dan efisien, hal ini juga berguna sebagai transparansi tugas dan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Melihat hasil observasi penulis pada lokasi pasar, dan bagaimana pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan melakukan tugasnya dengan baik dalam hal organizing jajarannya, sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti dari hal ini, hanya saja dengan catatan perlunya pemilihan petugas pengelolaan yang dapat bekerja dan mengambil solusi untuk kondisi yang tidak diduga, seperti kegiatan masyarakat yang ikut membuang sampah rumah tangga di pasar tradisional, atau petugas yang dapat lepas dari budaya Nepotisme

3. Actuating

Merupakan proses manajemen yang bertujuan untuk mengarahkan unsur-unsur yang terkait dari pasar tradisional itu sendiri, dengan harapan dapat memberdayakan sumber-sumber yang ada demi menjalankan fungsi masing-masing agar bisa berjalan dengan baik.

Kendala yang ditemukan oleh penulis, berdasarkan pada observasi penulis dalam hal ini ialah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dirasa sedikit kurang maksimal dalam proses actualing itu sendiri, dimana masih ada terlihat petugas yang berwenang menyalahgunakan kewenangannya, seperti petugas yang bertanggung jawab atas perizinan penggunaan kios di pasar tradisional tersebut, yang masih berbau nepotisme, hingga Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dirasa kurang maksimal untuk mempengaruhi masyarakat agar taat aturan, dengan tidak menyalahgunakan hak nya dalam penggunaan kios, mempertahankan kebersihan, menghilangkan sifat apatis masyarakat serta pedagang yang membiarkan pelanggaran terjadi didepan mata.

Dengan meningkatkan pengaruh yang dimiliki Instansi terkait dalam mempengaruhi masyarakat untuk menuju jalan yang diinginkan bersama, sehingga tujuan yang diinginkan dan telah direncanakan pada tahap planning dapat berjalan semestinya.

4. Controlling

Merupakan unsur terakhir dari manajemen tentang pengelolaan pasar, dimana controlling berfungsi sebagai langkah akhir yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan agar kegiatan demi mencapai tujuan awal dapat tetap berada pada jalurnya, dan dengan adanya controlling ini juga, dapat digunakan untuk mencari solusi yang menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu.

Melihat hasil observasi penulis, masih banyaknya pelanggaran dan ketidakselarasan yang terjadi dalam pengelolaan pasar, maka kendala yang terlihat pada unsur controlling ialah bagaimana pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, terlihat bagaimana pihak Dinas masih kecolongan pelanggaran yang cukup berpengaruh pada tujuan lain yang telah ditentukan pada tahap planning, yang mana bertujuan untuk menciptakan pasar ramah lingkungan yang berkualitas dengan meningkatkan selain dari pada infrastruktur, seperti peningkatan kualitas produk, etika berdagang, karakter pedagang, serta kualitas dari pemegang wewenang yang berada didalam satu kesatuan pasar.

Pelanggaran yang lepas dari control Dinas menjadi duri dalam daging dalam mencapai tujuan yang direncanakan, perlu adanya peningkatan pada proses controlling dari pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, bisa dilakukan dengan meningkatkan komunikasi antar atasan dan bawahan agar tidak ada hal yang dirahasiakan, serta melakukan control langsung oleh atasan dengan maksud memiliki kewenangan lebih dan memberikan ketegasan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dapat penulis simpulkan mengenai manajemen Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan pasar, seperti yang kita ketahui bahwa Dinas terkait memiliki dua tujuan utama sebagai garis besarnya, yaitu meningkatkan kualitas pasar dari segi infrastruktur, baik itu bangunan, kios, lahan parkir, drainase yang lancar, aspek-aspek pendukung lain dalam menunjang kegiatan perdagangan yang terjadi dipasar tradisional tersebut. Tujuan kedua yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan ialah meningkatkan kualitas produk dan kualitas pedagang, agar terciptanya daya saing yang tinggi serta memancing konsumen untuk datang membeli, dikarenakan produk yang dimiliki tidak kalah dengan produk pada wilayah lain. Pada prosesnya, pihak terkait telah melakukan unsur-unsur manajemen dengan cukup baik, seperti *planning, organizing, actuating, controlling*. Unsur-unsur yang ada sudah diberlakukan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan yang jelas, pengorganisasian tugas dan pelaksana tugas yang jelas, melakukan sosialisasi demi mempengaruhi baik pemegang wewenang dan masyarakat pasar agar melakukan perannya dengan sangat baik, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pengelolaan pasar agar tidak melenceng dari jalur yang diinginkan, dan dapat mencapai tujuan menjadi pasar yang ramai lingkungan yang mana nantinya dapat meningkatkan taraf hidup pedagang dan masyarakat sekitar.

Namun hal baik yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tidak lepas dari kelemahan, adapun kelemahan yang dapat ditemukan oleh penulis ialah, pelaksanaan tugas masing-masing pemegang wewenang pengelolaan pasar yang masih belum maksimal, terlihat bagaimana petugas kebersihan yang masih kesulitan dalam membersihkan pasar, walau kita ketahui bahwa masyarakat sekitar pasar juga ikut ambil bagian dalam peningkatan jumlah sampah di pasar, namun perlu kita ketahui, sampah yang menumpuk di pasar bukan hanya pada tempat pembuangan sementara, tapi juga di bagian dalam pasar, dilorong kios, dan sekitarnya. Hal lain yang ditemukan ialah proses pengawasan yang kurang maksimal dilihat dari masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang, baik dalam penyalahgunaan kios, tata letak kios yang tidak rapi, serta praktik nepotisme dalam mendapat izin atas penggunaan kios yang ada di pasar.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas mengenai manajemen pengelolaan pasar, saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ialah

1. Meningkatkan kualitas kerja petugas pengelola dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing
2. Meningkatkan pengaruh dari pihak terkait, dalam menaikkan kepatuhan baik masyarakat dan pedagang, serta petugas.

3. Melakukan control langsung oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan agar memberikan pengaruh lebih terhadap masyarakat dan jajarannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.T. Soegito, Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan, Widya Karya, Semarang, 2013, hlm. 21.

Azwar, Saifuddin. 2012. Metode Penelitian (13th ed.). Yogyakarta: PustakaPelajar.

Bayu Surya Ningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, 1992, Jakarta : Rineka Cipta,hal. 11.

Bryson, John M. (2007). Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bryson, J. M. (2004). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations – A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement Ed. Ke-3. San Fransisc: Josey-Bass.

David, Fred R. (2009). Strategic Management, Manajemen Strategik Konsep(12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), h. 11

Hasibuan, 2005, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: PT Toko Gunung

Handoko, T.Hani, (2011), Manajemen, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, hlm.8.

Hendrawan Supratikno, Et.al, Advanced Strategik Management, Jakarta, PT. Gremedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 1.

- Heru Sulisty, Budi Cahyono, Jurnal Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat di Kota Semarang, Vol.11 No.2, 2010, hlm. 517
- Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 2014), h. 5
- Ibrahim, Amin. (2009). Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya. Bandung : Refika Aditama.
- Inu Kencana Syafie, Sistem Pemerintahan Indonesia, 2011, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 8.
- Machfoedz, Ircham. (2007). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Fitramaya.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Hadari. (2005). Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan (3th ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21.
- M. Husni Mubarak, Manajemen Strategi, STAIN Kudus, 2009, hlm. 10.
- M. Saekan Muchith, Et.al, Cooperative Learning, RaSAIL, Media Group, Semarang, 2010, hlm. 23. 7 Ibid, hlm. 12.
- Muhammad Munir, Manajemen Dakwah, (jakarta: Prenada Media Group, Cetakan Ke-2, 2009), h. 9
- Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, 2007, Jakarta : Kelapa GadingPermai, hal. 24.
- Machfoedz, Ircham. (2007). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Fitramaya.
- Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah

(Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm. 9

Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. II 2013, hlm. 53.

Nawawi, H. Hadari. (2005). Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan (3th ed.). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nugroho, Herbsuki Nurcahyanto, Jurnal Strategi Pengembangan Pasar Tradisionaldi Kota Semarang, hlm. 6 32

Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Iwan. (2006). Manajemen Strategi. Bandung: Yrama Widia.

Rohiat, Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 14.

Riyaas Rasyid, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, 2002, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, hal. 14-16.

Rangkuti, Freddy. (2006). Analisis SWOT Teknik Membedah Suatu Kasus (12th ed.). Jakarta: Gramedia Salusu, J. (2005). Pengambilan Keputusan

Rangkuti, Freddy. (2006). Analisis SWOT Teknik Membedah Suatu Kasus (12thed.). Jakarta: Gramedia.

Salusu, J. (2005). Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit (8th ed.). Jakarta: Grasindo.

- Siagian, Sondang P. (2005). Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukidin, Damai Darmadi. (2011). Administrasi Publik. Yogyakarta :
LaksBang PRESSindo.
- Supriadi Legino, Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi : Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral, 2009, Jakarta : Indonesia Press.
- Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit (8th ed.).
Jakarta:Grasindo.
- Siagian, Sondang P. (2005). Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukidin, Damai Darmadi. (2011). Administrasi Publik. Yogyakarta :
LaksBang PRESSindo.
- Suwitri, Sri. (2009). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sofia Rusdiana, Skripsi Perancangan Pasar Wisata Dengan Pendekatan Historicism di Malang, Malang, 2018, hlm. 10-11
- Suryadi, Skripsi Strategi Pengembangan Pasar Segar Depok, Jakarta, 2014, hlm. 7
- Syafiie, Inu Kencana. (2008). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). Manajemen Modern Untuk Sektor Publik.
Yogyakarta:
- Balairung & Co. Azwar, Saifuddin. 2012. Metode Penelitian (13th ed.).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwitri, Sri. (2009). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

Syafiie, Inu Kencana. (2008). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). Manajemen Modern Untuk Sektor Publik.

Yogyakarta: Balairung & Co.

Talidhuhu Ndraha, Kyberology I (Ilmu Pemerintahan Baru), 2003, Jakarta :Rineka Cipta, hal. 6.

Wheelen and Hungr. (2012) "Management and. Business policy", thirteenth edition, New York.

B. Jurnal

Herdianto. 2018, " *Manajemen Strategi Pengelolaan Pasar Johar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam*. Jepara

Bekti Rahayu, R.Slamet Santoso, Maesaroh. 2014, " *Analisis Sestrategi Pengelolaan Pasar*". Semarang

Fernida Arlisa Widyasari, Tri Yuniningsih 2012. " *Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional*. Jepara

C. Dokumentasi

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah

Perpes RI No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 4

Peraturan Daerah Pelalawan No 10 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah.